

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR  
GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK  
DAERAH DI PROVINSI GORONTALO**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum**

**Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik**



**SUPRIN J. ABDULLAH**

**NIM. S.311005031**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2012**

**LEMBAR PERNYATAAN**

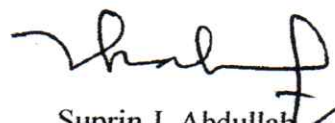
Nama : **SUPRIN J. ABDULLAH**

NIM : **NIM. S. 311005031**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI PROVINSI GORONTALO”** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal yang bukan karya, dalam tesis tersebut diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keasliannya, saya memperbolehkan tesis ini di-*upload* dalam *website* Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Gorontalo, 8 Oktober 2012  
Yang membuat,




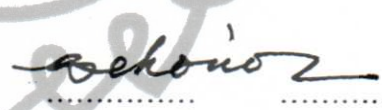
Suprin J. Abdullah  
NIM. S311005031

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23  
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH DI PROVINSI GORONTALO**


**DISUSUN OLEH:**

**SUPRIN J. ABDULLAH**  
NIM. S.31105031

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing  
Dewan Pembimbing**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH.</u> Nip.196302091988031003		.....
Pembimbing II	<u>Prof. Dr. H. Setiono, SH.,MS.</u> Nip. 194405051969021001		.....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


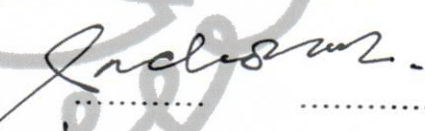

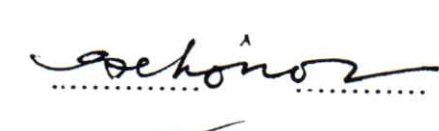
  
**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH.**  
Nip.196302091988031003

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23  
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH DI PROVINSI GORONTALO**

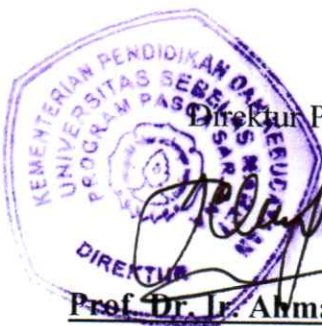

**DISUSUN OLEH:**

**SUPRIN J. ABDULLAH**  
NIM. S.311005031

**Telah disetujui oleh Tim Penguji**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<b><u>Dr. M. Hudi Asrori, SH, M.Hum</u></b> Nip. 196011071989111001		.....
Sekretaris	<b><u>Dr. Soehartono, SH, M.Hum</u></b> NIP. 195604151985031002		.....
Anggota	<b><u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH.</u></b> NIP.196302091988031003		.....
Anggota	<b><u>Prof. Dr. H. Setiono, SH.,MS.</u></b> NIP. 194405051969021001		.....

Mengetahui

  
Direktur Program  
  
**Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.**  
NIP. 196107171986011001

  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum  
  
**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH**  
NIP.196302091988031003



## ABSTRAK

Suprin J. Abdullah. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Gorontalo. Tesis. Program Studi Hukum. Progam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Gorontalo

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologi ( non-doktrinal) untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Bentuk penelitian ini jika dilihat dari sudut bentuknya termasuk penelitian evaluative. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan subjek penelitian Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bidang Pembinaan Kekayaan, Kasubid Pengendalian Aset, Kasubid Pengkajian Hukum, dan Staf pada bidang aset Badan Keuangan provinsi Gorontalo

Temuan hasil penelitian adalah (1) Substansi hukum yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah belum efektif. Dalam hal sanksi pasal 6, pengawas intern cenderung melakukan tindakan tidak tegas, sehingga sebagian masyarakat tidak mentaati Peraturan Gubernur tersebut. (2) Struktur hukum, dalam hal ini aparat pemerintah (inspektorat), belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun dalam hal sosialisasi dan pelayanan aparat pemerintah telah menunjukkan kinerja yang baik, namun khusus dalam hal pengawasan, aparat pemerintah belum berperan dengan baik, disebabkan karena minimnya sarana maupun fasilitas yang memadai. (3) Sikap dan perilaku pegawai yang terbiasa menggunakan aset daerah tidak disertai dengan tanggung jawab menyebabkan barang milik daerah mengalami kerusakan dan hilang

Kata kunci : *Implementasi, Peraturan Gubernur Gorontalo, Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*

## ABSTRACT

**Suprin J Abdullah. Implementation of Governor Regulation Number 23 Year of 2007 Regarding Technical Guidance of Regional Government owns Management in the Province of Program of Sebelas Maret University. Surakarta 2012.**

The purpose of this research is to know implementation of Governor Regulation number 23 Year of 2007 regarding Technical Guidance of Regional Government Own Management in Gorontalo Province.

This research uses kinds of law research of sociology (non doctrinal) to know problems and to gain information and data which is exist in the location of the research. The form of the research is inclusive in evaluative research. Data of the research are gained through observation and interview with subjects of the research, they are head of BPKP of Gorontalo Province agency, Head of monetary board, Head of the field of Property Guiding, Head of sub branch of Asset Controlling, Head of sub branch of Law Study, and staff of the field of asset of Monetary board of Gorontalo Province.

The result of the research are (1) Law substance which are in the regulation of Governor number 23 Year of 2005 regarding technical Guidance of regional Government Own which has not yet been effective. In the term of sanction of article number 6, internal watcher tends to perform action which is not sure and undoubtful, so that a part of community did not obey the governor regulation. (2) Law structure, in this term, government (inspectorat) has not yet been effective in performing the its signment. Although in the term of socialization and service of government officer has shown good work achievement, but especially in the term of controlling, government officer has not yet have good role, it is because of the less of tools and facilities which are available. (3) Attitude and behaviours of the officers who did not got responsibility in using regional asset that cause regional own asset damage and lost.

**Keywords :** Implementation, The Governor Regulation of Gorontalo, Technical Guidance of regional government own assets.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah Di Provinsi Gorontalo “ ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Magister Hukum Kebijakan Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Solo

Berkaitan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang telah memberikan kesempatan dan bantuan serta dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi Pascasarjana
5. Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi S2 .
6. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo
7. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono,SH,MH, selaku Ketua Program studi Magister (S2) dan Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Prof Dr. Setiono ,SH, MS selaku pembimbing II yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.

9. Bapak Amrizal Ak. Sebagai Kepala BPKP Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan masukan untuk kepentingan dalam penulisan tesis ini
10. Kepala Badan Keuangan yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian
11. Bapak I Nyoman Suprayatna, Ak sebagai kepala Subditlas BPKP di Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai
12. Bapak Drs Efendi Ipango, Msi Selaku Kepala Bidang Pembinaan Kekayaan Pemda
13. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset yang banyak membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan .
14. Seluruh Dosen dan staf administrasi Program studi Ilmu hukum Universitas Sebelas Maret.
15. Staf pada badan keuangan Daerah khususnya pada bidang kekayaan Pemda.
16. Drs. Musanif Niode, Mcc.dev. (Suami tercinta), Familia Ananda Niode dan Raihan Fayyad Niode (anak-anakku tersayang) yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan tesis ini

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan kesadaran yang tinggi sebagai penulis yang tak luput dari salah, apa yang penulis tuangkan dalam tesis ini jauh dari kesempurnaan,

Gorontalo, 8 Oktober 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL .....	i
LOGO .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	 6
A. Landasan Teori .....	6
1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik .....	6
2. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik .....	7
3. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat .....	10
4. Pengertian Aset dan Sistem Pengelolaan Barang Milik daerah .....	11
5. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah .....	12
6. Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	15
7. Azas-Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	17
8. Sejarah dan Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	17
9. Pengertian Barang Milik Daerah .....	18
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah .....	22
B. Kerangka Berpikir Penelitian .....	50
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 51
A. Lokasi Penelitian .....	51
B. Jenis Penelitian .....	51
C. Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52

E. Teknik Analisis Data.....	53
F. Kerangka Konseptual .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Penelitian .....	59
B. Pembahasan .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	88
C. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>

